

IMPLEMENTATION OF THE POPULATION ADMINISTRATIVE INFORMATION SYSTEM (SIAK) IN IMPROVING PUBLIC SERVICES (Study at the Office at Pao-Pao Village Office, Tanete Rilau District, Barru Regency)

Jumria

STIA Al Gazali Barru
jumria@algazali.ac.id

ABSTRACT

Implementation is a direction that can be realized as a result of planned and organized activities in order to achieve standards and policy targets by taking into account the environment and the impacts of various forms of activities. Office at Pao-Pao Village Office, Tanete Rilau District, Barru Regency. has implemented the Population Administration Information System (SIAK). The purpose of this SIAK is to organize Adm. Population, SIAK at the Pao-Pao Village Office, Tanete Rilau District, Barru Regency. has been implemented since 2007 Law no. 23 of 2006 concerning Adm. Population was later revised into Law no. 24 of 2013, and Permendagri No. 25 of 2011 concerning Guidelines for the Study, Development and Management of SIAK. The implementation of SIAK in improving public services can be realized if there are several things that must be considered such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. In this study, researchers used a descriptive method with a qualitative approach, data collection techniques were carried out by collecting primary and secondary data, and the Pao-Pao Village Office Apparatus, Tanete Rilau District, Barru Regency and the community who became informants in this study. Based on data collection in the field, in general it can be seen that the implementation of SIAK in improving public services can be categorized as quite good because the services provided to the community are timely, and not convoluted,

and SOPs have also been implemented properly. However, there are several obstacles in implementing SIAK in the Pao-Pao Village Office, Tanete Rilau District, Barru Regency, the human resources are inadequate and the infrastructure in the form of buildings and service rooms has not met the Minimum Service Standards.

Keywords: Implementation, SIAK, Public Services, and Disdukcapil, Pao-Pao village

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR DI KANTOR DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU.)

ABSTRAK

Implementasi merupakan suatu arah yang dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk dapat mencapai standar dan sasaran kebijakan dengan memperhatikan lingkungan serta dampak diberbagai bentuk kegiatannya. Kantor di Kantor Desa Pao -Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun tujuan dari SIAK ini adalah untuk menata Adm. Kependudukan, SIAK di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. sudah diterapkan sejak tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adm. Kependudukan kemudian direvisi menjadi UU No. 24 Tahun 2013, dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK. Implementasi SIAK dalam meningkatkan pelayanan publik dapat diwujudkan apabila ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan skunder, dan Aparatur Kantor desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru beserta masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini. Berdasarkan perolehan data dilapangan, secara umum dapat diketahui bahwa Implementasi SIAK dalam meningkatkan pelayanan publik dapat dikategorikan cukup baik karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tepat waktu, dan tidak berbelit – belit, dan SOP juga sudah diterapkan dengan baik. Namun ada beberapa hambatan dalam implementasi SIAK di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yaitu sumber daya manusia kurang memadai dan sarana prasana berupa gedung dan ruang pelayanan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Kata Kunci: Implementasi, SIAK, Pelayanan Publik dan Disdukcapil, desa Pao-Pao

A. PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mendefenisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik didalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan (W. Riawan Tjandra, 2005 : 9).

Informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan

bisnis dan organisasi, sehingga informasi merupakan variabel yang penting dalam operasi organisasi, disamping sumber daya alam, modal dan manusia. Selain itu keterbatasan manusia untuk mampu mengolah data dan informasi yang begitu cepat berubah dan mendorong manusia untuk memanfaatkan secara optimal teknologi dan sistem informasi. Pada jaman sekarang ini teknologi dan sistem informasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan kegiatan sehari hari. Informasi dibutuhkan untuk menyusun strategi yang dipakai dalam pencapaian tujuan organisasi, baik dalam perencanaan maupun pengawasan kegiatan organisasi. Sistem pengawasan yang efektif diperlukan dalam kegiatan operasional organisasi, agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian informasi dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan serta meningkatkan produktivitas anggotanya.

Banyak istilah yang berhubungan dengan informasi, istilah yang sering digunakan adalah sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen berbasis komputer, teknologi informasi, teknologi komputer, manajemen informasi, dan sistem informasi. Salah satu bentuk penerapan sistem informasi diantaranya

adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan lain sebagainya. SIAK merupakan salah satu jenis perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada suatu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. Data kependudukan pada saat ini masih tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan masih belum akurat. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Dalam pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga secara administrasi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sesuai dengan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi (Idil Fikri,2011:3), "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk", yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan lain sebagainya.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing – masing alternative bersaing untuk memecahkan masalah. Pengertian Pelayanan Publik Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, dan ramai. Inu dan kawan – kawan mendefenisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang merasa memiliki. Dengan demikian, pelayanan publik diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Lijan Poltak Sinambela, 2006 : 5).

B. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Pada pendekatan ini kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan hubungan masalah-masalah penelitian yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah : (i). Teknik pengumpulan data primer Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu: a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan kunci atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian. b. Observasi, yaitu teknik pengumpuln data dengan pengamatan secara langsung objek

penelitian dengan mencatat gejala - gejala yang ditemukan dilapangan untuk mempelajari data - data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. (ii). Teknik pengumpulan data sekunder Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu : a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen - dokumen atau catatan - catatan yang ada dilokasi penelitian serta foto-foto yang terkait dengan penelitian. b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data diperoleh dari buku - buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara informan. Menurut Burhan Bungin terdapat beberapa

aktifitas dalam analisis data yaitu: (i). Reduksi data Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan dilapangan selama meneliti, tujuan dilakukannya transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan. (ii). Penyajian data Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian - bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. (iii). Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data - data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, dan persamaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik yang profesional tanpa adanya diskriminasi. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor desa Pao-Pao kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, dan observasi atau pengamatan secara langsung, maka diperoleh data responden dalam kaitannya dengan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kantor desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Adapun data-data yang disajikan terdiri dari dua bagian, yaitu data identitas responden dan data variabel penelitian. Penyajian data mengenai karakteristik responden adalah untuk mengetahui spesifikasi (ciri-ciri khusus) yang dimiliki oleh responden yaitu

meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Sedangkan penyajian data tentang variabel penelitian adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Data-data tersebut disajikan sebagai berikut:

Perangkat Pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1. Perangkat Keras (*Hardware*) Komputer yang dimiliki oleh Kantor desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru memiliki spesifikasi yang relatif tinggi mengingat beban kerjanya sebagai penyimpan, pengelola dan pengaturan data. Personal Komputer (PC), komputer ini harus berada di masing – masing unit yang membutuhkan program aplikasi untuk pengelolaan administrasi kependudukan. Semua komputer client terhubung dengan database dan website server. Personal komputer (PC) yang digunakan dalam operasionalisasi SIAK mempunyai spesifikasi umum sebagai berikut :
 - Processor : Pentium Celeron G1610
 - Monitor : HP
 - Printer : EPSON
 - HDD : 500 GB
 - CD Rom/CDR/RW : HP

2. Perangkat Lunak (*Software*) Sistem aplikasi SIAK ini berbasis Web sehingga dalam pemanfaatannya diperlukan web browser yang diakses melalui TPDK untuk dapat menggunakan SIAK. Infrastruktur SIAK ini dirancang menggunakan VPN dial yang melakukan koneksi secara sinkronis dari TPDK ke Pusat Data (Data Center Adminduk) dan sebaliknya. Aplikasi SIAK adalah suatu sistem informasi yang ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan bidang administrasi kependudukan seperti pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk, dan pendayagunaan informasi kependudukan. Sistem aplikasi ini mengelola data penduduk yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Aplikasi SIAK ini didesain sebagai aplikasi terpusat (*centralized application*) yang diakses melalui TPDK (Tempat Perekaman Data Penduduk) yang berbasis di Kecamatan. Sistem ini juga berfungsi sebagai perekam dan pencetak data penduduk dan juga berfungsi sebagai buku laporan.

Pengelolaan data kependudukan melalui aplikasi SIAK ini meliputi pengelolaan pelayanan:

- Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan)

- Penerbitan KK (Kartu Keluarga)
- Penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Penerbitan Akta Kelahiran e. Penerbitan Akta Kematian
- Penerbitan Akta Perkawinan WNI/WNA .
- Penerbitan Akta Perceraian WNI/WNA.
- Pelaporan Kedatangan.
- Pelaporan Perpindahan.
- Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

3. Jaringan Komunikasi Data Dalam rangka menghubungkan database dan website server ke Pusat Data (Data Center Adminduk) Kementerian Dalam Negeri jaringan internet yang digunakan oleh di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah Jaringan Telkom.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini, pihak pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan, terutama dalam hal pelayanan

di bidang administrasi kependudukan, karena begitu pentingnya data-data mengenai kependudukan dalam upaya tertib administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaannya agar pelayanan bidang administrasi kependudukan dapat lebih baik, maka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan sekaligus merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap pelayanan umum kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan merupakan tugas, kewajiban dan fungsi dari pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Pelayanan masyarakat merupakan pelayanan yang dilakukan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pelayanan publik (*public service*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara). Pelayanan publik yang baik, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan

(aparatur pemerintah).

Bila jasa/layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa/layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan masyarakat, maka kualitas jasa/layanan yang diberikan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya bila jasa/layanan yang diterima lebih rendah dari pada diharapkan, maka kualitas/layanan akan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik atau buruknya kualitas jasa/layanan tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan masyarakat secara konsisten. Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah telah melaksanakan usaha dan upaya semaksimal mungkin dalam memberi pelayanan terbaik dalam hal kependudukan.

Usaha tersebut adalah melalui aplikasi SIAK yang merupakan suatu sistem database fleksibel dimana data-data kependudukan bisa di input, di update, di edit, di manage, dan di share sehingga terbangun suatu sistem informasi bersama (online) sehingga semua pihak bisa menggunakan data tersebut untuk kepentingan bersama dengan otoritas tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

mulai dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah adalah suatu sistem informasi yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali serta mendistribusikan jenis data kependudukan dari segala aspek dan aktivitas masyarakat. Sistem informasi kependudukan yang selalu up to date sangat dibutuhkan pada suatu pemerintahan. Selama ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode sensus, maupun survei. Metode ini dirasakan belum memadai untuk memperoleh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam menetapkan kebijakan, sehingga dirasakan perlunya standarisasi pengolahan data kependudukan yang terpadu baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun daerah dengan jalan mengembangkan sistem yang baku untuk mengolah informasi kependudukan.

Diadakannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi masyarakat di desa Pao-Pao diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan, terutama dalam masalah kependudukan. Pada penelitian ini, penulis melihat implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari teori yang dikemukakan oleh George Edward III berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Komunikasi,

Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti yang diuraikan kedalam skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

- Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat mulai diterapkan pada tahun 2007. Penerapan SIAK ini berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK. biaya penerapan ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

- Komunikasi dalam Implementasi SIAK di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ditransmisikan secara verbal dan non verbal dalam bentuk lisan dan tulisan, dan Komunikasi antar aparat pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan pihak diluar Dinas sudah berjalan baik dan lancar. Komunikasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya sudah dapat dikategorikan cukup baik, dan komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat juga sudah maksimal.
- Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat dikatakan belum memadai. Namun pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat sudah memiliki kompetensi yang cukup baik dan sesuai dengan bidangnya masing – masing. b. Sumber Daya Finansial/ Dana Anggaran yang digunakan oleh Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten

Barru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c. Fasilitas Fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat sudah cukup memadai, hanya saja gedung kantor yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal karena kondisi ruangan yang ada saat ini masih tergolong sempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif : aktualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011.
- Eriyanto. Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Bogor : IPB Press, 2003.
- Gie, The Liang. Unsur – Unsur Administrasi : Suatu Kumpulan Karangan. Yogyakarta : Supersukses, 1983. HM, Jogianto. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta : Andi, 2003.
- Istianto HP, Bambang. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009.
- Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media, 2009.
- Kristanto, Andri. Perancangan

Sistem Informasi dan Aplikasinya.
Yogyakarta : Gava Media, 2003.

Lucas, David. dkk., Pengantar Kependudukan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990

Nugraho, Eko. Sistem Informasi Manajemen :Konsep, Aplikasi, dan Perkembangannya. Yogyakarta : Andi, Fikri, Idil. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk", (Fisip USU, Medan, 2011),

Jurnal :

Ahmad Drajat, Dandy. dkk., "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan : Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil", e - Jurnal Administrative Reform, Vol. 2 No. 3 (2014).

Holle, Erick S. "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service", Jurnal Sasi, Vol.17 No.3 (Juli-September, 2011),

Peraturan Perundang - Undangan :

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.